

**METADATA STATISTIK
KEGIATAN**

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Fasilitas Pembentukan Produk Hukum dan Fasilitas Bantuan Hukum Sumatera Barat
Tahun Kegiatan		2023
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan		Produktivitas
Jenis Kegiatan Statistik		Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi		K-22.1300.009
I. PENYELENGGARA		
1.1	Instansi Penyelenggara	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
1.2	Alamat	Jl. Sudirman No. 51 Padang
	Telepon	08116920249
	Faksimile	-
	<i>Email</i>	surat.rokum@gmail.com
II. PENANGGUNG JAWAB		
2.1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
	Eselon 2	Kepala Biro Hukum
2.2	Penanggung Jawab Teknis	
	Nama	M. Rezha Fahlevie, SH, MH
	Jabatan	Kepala Bagian Bantuan Hukum
	Alamat	Jl. Jendral Sudirman, No. 51
	Telepon	0751-31458
	Faksimile	0751-31458
	<i>Email</i>	biro.hukum@sumbarprov.go.id
III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN		
3.1	Latar Belakang Kegiatan	1. Tahapan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Belum Terdokumentasi Dengan Baik Mengakibatkan Proses/alur Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Belum Terkontrol Dengan Baik, Sehingga Diperlukan Tools Pendukung Yang Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan 2. Tahapan fasilitas bantuan hukum yang memerlukan tertib administrasi inventarisasi data yang lebih baik lagi terhadap gugatan perkara dan bantuan advokasi hukum yang diajukan ke Biro Hukum

3.2	Tujuan Kegiatan	1. Untuk mengetahui jumlah capaian target (output), dan persentase fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan/pembentukan produk hukum daerah provinsi dan kab/kota sampai ditetapkan dan diundangkannya produk hukum daerah tersebut. 2. Untuk mengetahui jumlah pencapaian target (output) , dan persentase fasilitasi bantuan hukum, berupa penanganan perkara pemerintah daerah di pengadilan, serta bantuan advokasi terhadap masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan.
3.3	Rencana Jadwal Kegiatan	
	Perencanaan Kegiatan	2022-11-01 s.d. 2022-11-30
	Desain	2022-12-01 s.d. 2022-12-30
	Pengumpulan Data	2023-01-02 s.d. 2023-12-29
	Pengolahan Data	2023-01-02 s.d. 2023-12-29
	Analisis	2023-01-02 s.d. 2023-12-29
	Diseminasi Hasil	2023-06-01 s.d. 2023-12-29
	Evaluasi	2024-01-02 s.d. 2024-01-31

3.4 Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi pembentukannya	Pengumpulan Rancangan /Draft Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan produk hukum daerah provinsi dan kab/kota yang dapat dihimpun dalam satu tahun	selama tahun 2023
Jumlah target rancangan produk hukum daerah yang akan difasilitasi pembentukannya	Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai data yang ditargetkan berdasarkan data prolegda/propempera	Jumlah rancangan produk hukum daerah provinsi dan kab/kota yang telah dihimpun dan ditetapkan sebagai target dalam satu tahun.	selama tahun 2023
Jumlah Target perkara yang akan difasilitasi	Penetapan perkara/gugatan ke Pemda yang telah diinventarisasi berdasarkan data tahun sebelumnya dan tahun berjalan	Jumlah perkara yang telah dihimpun dan ditetapkan sebagai target dalam satu tahun.	selama tahun 2023
Jumah perkara yang diselesaikan	Data perkara/gugatan ke Pemda yang telah ditindaklanjuti	Jumlah perkara yang dapat ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dalam satu tahun	selama tahun 2023

IV. DESAIN KEGIATAN		
4.1	Kegiatan ini dilakukan	BERULANG

4.2	Frekuensi Penyelenggaraan	TRIWULANAN
4.3	Tipe Pengumpulan Data	LONGITUDINAL_PANEL
4.4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
4.5	Wilayah Kegiatan	
	Provinsi	Kabupaten/Kota
	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN
	SUMATERA BARAT	SOLOK
	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG
	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR
	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN
	SUMATERA BARAT	AGAM
	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA
	SUMATERA BARAT	PASAMAN
	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN
	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA
	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT
	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG
	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK
	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO
	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG
SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	
SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	
SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	
4.6	Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan data sekunder
4.7	Sarana Pengumpulan Data	Lainnya : Data Rekapitulasi Pelaksanaan Fasilitasi Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
4.8	Unit Pengumpulan Data	Lainnya : OPD
V. DESAIN SAMPEL (khusus survei)		
5.1	Jenis Rancangan Sampel	-
5.2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir	-
5.3	Metode yang Digunakan	-
5.4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir	-

5.5	Fraksi Sampel Keseluruhan	-
5.6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama	-
5.7	Unit Sampel	-
5.8	Unit Observasi	-
VI. PENGUMPULAN DATA		
6.1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak
6.2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya : Pencatatan Manual
6.3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak
6.4	Petugas Pengumpulan Data	Mitra/tenaga kontrak
6.5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma I/II/III
6.6	Jumlah Petugas	Supervisor/penyelia/pengawas: 4 Pengumpul data/enumerator: 4
6.7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Tidak
VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
7.1	Tahapan Pengolahan Data	Validasi
7.2	Metode Analisis	DESKRIPTIF
7.3	Unit Analisis	Lainnya : OPD Provinsi dan Bagian Hukum Kab/Kota
7.4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Provinsi
VIII. DISEMINASI HASIL		
8.1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum	
	Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya
	Digital (<i>softcopy</i>)	Ya
	Data Mikro	Tidak
8.2	Rencana Rilis Produk Kegiatan	
	Tercetak	2024-02-01;
	Digital	2024-02-01;
	Data Mikro	-

**METADATA STATISTIK
VARIABEL**

Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah variabel dapat diakses umum
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi pembentukannya	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi pembentukannya	Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi pembentukannya	-	1 Tahun	Persentase	Persen	integer	-. -	Menyesuaikan dengan aturan PUU yang lebih tinggi;	Berapa jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi pembentukannya?	Ya
Jumlah target rancangan produk hukum daerah yang akan difasilitasi pembentukannya	Jumlah target rancangan produk hukum daerah yang akan difasilitasi pembentukannya	Produk Hukum Daerah	Jumlah target rancangan produk hukum daerah yang diusulkan untuk difasilitasi pembentukannya dan telah ditetapkan bersama DPRD dan OPD Pengusul/Pemrakarsa	-	1 tahun terakhir	Persentase	Persen	Integer	-. -	Menyesuaikan dengan peraturan PUU yang lebih tinggi;	Berapa jumlah rancangan produk hukum daerah yang diusulkan untuk yang difasilitasi pembentukannya?	Ya
Jumlah Target perkara yang akan difasilitasi	Jumlah Target perkara yang akan difasilitasi	Perkara	Jumlah gugatan perkara yang akan difasilitasi penanganannya di pengadilan	-	Selama tahun 2023	Jumlah	Perkara	integer	-. -	-;	Berapa jumlah gugatan perkara yang masuk dalam 1 tahun?	Ya
Jumah perkara yang diselesaikan	Jumah perkara yang diselesaikan	Perkara	Jumah perkara masuk untuk difasilitasi penanganannya sampai diselesaikan	-	1 tahun terakhir	Persentase	Persen	integer	-. -	-;	Berapa jumlah perkara yang diselesaikan dalam 1 tahun?	Ya

**METADATA STATISTIK
INDIKATOR**

Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun	Level Estimasi	Apakah indikator dapat diakses umum
Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	Persentase jumlah perkara yang ditangani di pengadilan	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan oleh pemerintah Provinsi	Semakin tinggi penanganan perkara yang difasilitasi, maka akan meningkatkan akses keadilan bagi pemerintah dan masyarakat	Jumlah perkara yang telah ditangani dibagi Jumlah target perkara yang ditangani X 100%	Persentase	Persen	-	Tidak	-	-	Provinsi	Ya
Persentase produk hukum	Persentase produk hukum yang diselesaikan	Persentase produk hukum yang difasilitasi pembentukannya sampai diundangkan	Pembentukan produk hukum daerah yang diundangkan tidak tumpang tindih dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum	Jumlah produk hukum yang telah selesai difasilitasi dan diundangkan dibagi jumlah target produk hukum yang ditetapkan dikali 100%	Persentase	Persen	-	Tidak	-	Produk Hukum	Provinsi dan Kabupaten Kota	Ya